

Pengaruh *Technology Acceptance Model* (TAM) dan Kompetensi Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Kualitas Sistem SIPD (Studi Kasus pada BPKAD Kabupaten Dompu)

Abil Zabilla¹, Chairul Adhim², Risca Ariska Ramadhan³

^{1,3}Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Indonesia

²Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Jun 18, 2026

Revised Jul 04, 2026

Accepted Jul 20, 2026

Keywords:

Technology Acceptance Model
Kompetensi Pegawai
Kualitas Sistem SIPD
Kualitas Laporan Keuangan
BPKAD

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Model Penerimaan Teknologi* (TAM) dan Kompetensi Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui kualitas sistem SIPD di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu dengan pendekatan kuantitatif desain kausal asosiatif. Populasi penelitian seluruh pegawai berjumlah 94 orang, dengan sampel 76 pegawai dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dengan skala Likert lima poin. Analisis data menggunakan multiple linear regression test, *path analysis*, dan mediasi test dengan software IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TAM tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas sistem SIPD atau kualitas laporan keuangan. Di sisi lain, kompetensi pegawai memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas sistem SIPD dan kualitas laporan keuangan. Kualitas sistem SIPD juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil uji mediasi menunjukkan kualitas sistem SIPD mampu memediasi hubungan antara kompetensi pegawai dengan kualitas laporan keuangan secara parsial, namun tidak mampu memediasi hubungan antara TAM dengan kualitas laporan keuangan. Secara bersamaan, TAM, kompetensi pegawai, dan kualitas sistem SIPD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kompetensi pegawai dan optimalisasi sistem SIPD dalam menghasilkan laporan keuangan daerah yang akurat, transparan, dan akuntabel.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Corresponding Author:

Abil Zabilla,
Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Indonesia,
Jl. Syech Muhammad Lingkar Utara Sawete Bali 1 Dompu, Nusa Tenggara Barat.
Email: abilzabilla027@gmail.com,

1. PENDAHULUAN

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Laporan keuangan daerah yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban fiskal, tetapi juga sebagai dasar evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan oleh berbagai pemangku kepentingan (Suryato & Noch, 2023). Secara umum, peningkatan kualitas laporan keuangan tidak terlepas dari dukungan sistem informasi

yang andal serta sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola data keuangan. Meskipun demikian, masih terdapat keterlambatan penyampaian laporan keuangan, kesalahan dalam pencatatan transaksi, serta ketidaksesuaian antara data keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Selain itu, dalam implementasi sistem informasi keuangan daerah juga masih ditemukan berbagai kendala, seperti gangguan sistem, keterbatasan pemahaman pegawai terhadap sistem informasi, serta kurang optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data keuangan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih perlu terus ditingkatkan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki peran yang sangat penting dalam proses pencatatan, pengelolaan, serta penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. BPKAD bertanggung jawab dalam memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan dicatat secara akurat serta disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem informasi yang digunakan serta kompetensi pegawai yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, pemerintah mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sistem informasi terintegrasi yang mendukung proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah secara elektronik. Penerapan SIPD diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, serta konsistensi data keuangan daerah (Sa'adah & Nasrullah, 2021). Namun demikian, efektivitas penerapan SIPD tidak hanya bergantung pada kualitas sistem secara teknis, tetapi juga pada penerimaan pengguna dan kemampuan pegawai dalam mengoperasikan sistem tersebut. Menurut DeLone dan McLean (2003), kualitas sistem informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi yang dihasilkan, sehingga semakin baik kualitas sistem SIPD maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan.

Dalam konteks penerimaan teknologi, *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1989) menjelaskan bahwa penggunaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan. Pengembangan model ini oleh Venkatesh dan Davis (2000) menunjukkan bahwa penerimaan teknologi berpengaruh terhadap kinerja individu. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat penerimaan teknologi oleh pegawai, maka akan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Selain faktor penerimaan teknologi, kompetensi pegawai juga menjadi faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kompetensi pegawai mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam memahami regulasi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintahan, serta penggunaan sistem informasi keuangan. Menurut Spencer dan Spencer (1993), kompetensi merupakan karakteristik dasar individu yang mempengaruhi kinerja secara efektif. Penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi pegawai, maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Selain itu, kualitas sistem SIPD juga berperan sebagai variabel mediasi yang menjembatani hubungan antara *Technology Acceptance Model* (TAM) dan kompetensi pegawai terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut Baron dan Kenny (1986), variabel mediasi berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen, sehingga kualitas sistem SIPD diduga memperkuat pengaruh penerimaan teknologi dan kompetensi pegawai terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian sebelumnya umumnya hanya menguji pengaruh penerimaan teknologi atau kompetensi pegawai secara terpisah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, penelitian yang mengkaji peran kualitas sistem SIPD sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara *Technology Acceptance Model* (TAM), kompetensi pegawai, dan kualitas laporan keuangan masih relatif terbatas, khususnya pada organisasi perangkat daerah tingkat kabupaten. Selain itu, pada BPKAD Kabupaten Dompu masih ditemukan kendala dalam optimalisasi penggunaan SIPD serta variasi kompetensi pegawai dalam mengoperasikan sistem, yang berpotensi mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis pengaruh *Technology Acceptance Model* (TAM) dan kompetensi pegawai terhadap kualitas laporan keuangan melalui kualitas sistem SIPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu.

Grand Theory

Penelitian ini didasarkan pada *Stewardship Theory* yang menjelaskan bahwa aparaturnya pemerintah sebagai pengelola sumber daya publik memiliki orientasi pada kepentingan organisasi dibanding kepentingan pribadi. Dalam konteks penelitian ini, pegawai sebagai steward diharapkan mampu memanfaatkan teknologi, memiliki kompetensi memadai, serta menggunakan SIPD secara optimal guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Teori ini mendasari hubungan antara faktor manusia, pemanfaatan sistem informasi, dan kualitas pelaporan keuangan (Aprila, Andriani, & Ananto, 2023). Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pegawai pemerintah diharapkan mampu memanfaatkan sistem informasi serta menyusun laporan keuangan secara transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan (Herlina, Taufik, & Nasir, 2021).

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan model yang digunakan untuk menjelaskan berbagai faktor yang memengaruhi penerimaan individu terhadap suatu teknologi. Model ini menyatakan bahwa penggunaan sistem informasi dipengaruhi oleh *perceived usefulness* (persepsi kegunaan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan), yang selanjutnya akan menentukan sikap serta intensitas penggunaan sistem tersebut. Dalam konteks penelitian ini, TAM diaplikasikan untuk menjelaskan sejauh mana tingkat penerimaan pegawai terhadap Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat memengaruhi efektivitas penggunaannya dalam pengelolaan keuangan daerah (Sayekti & Putarta, 2016).

Indikator Technology Acceptance Model (TAM)

Untuk mengukur penerimaan tersebut di BPKAD Kabupaten Dompu, penelitian ini mengadaptasi tiga dari lima indikator TAM berdasarkan kajian komprehensif (Azhar & Sari, 2022) yang dinilai paling relevan. Indikator pertama adalah *perceived usefulness*, yaitu tingkat kepercayaan pengguna bahwa pemakaian SIPD akan meningkatkan efisiensi, kinerja, dan produktivitas kerjanya. Indikator kedua adalah *perceived ease of use*, yang dimaknai sebagai keyakinan pengguna bahwa pengoperasian SIPD sangat mudah, bebas dari kesulitan teknis yang berarti, dan tidak membutuhkan usaha yang berat. Indikator terakhir adalah *actual system use* atau penggunaan sistem secara aktual, yang merupakan manifestasi konkret dari niat pengguna di mana mereka benar-benar menggunakan SIPD secara faktual dalam aktivitas sehari-harinya untuk menyelesaikan tugas-tugas pengelolaan keuangan daerah.

Kompetensi Pegawai

Kompetensi pegawai merupakan kemampuan individu yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan tugas secara efektif. Dalam ranah pengelolaan keuangan daerah, kompetensi ini berperan sangat penting untuk memastikan ketepatan pencatatan, pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan, serta kemampuan dalam mengoperasikan sistem informasi keuangan. Pegawai yang memiliki tingkat kompetensi tinggi akan lebih mumpuni dalam menghasilkan informasi keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Untuk mengukur variabel kompetensi tersebut di lingkungan BPKAD Kabupaten Dompu, penelitian ini mengadaptasi tiga dari lima indikator yang dikembangkan dalam kajian (Hadis, 2022) karena dinilai paling relevan. Indikator pertama adalah pengetahuan akuntansi pemerintahan, yang menjadi fondasi dasar bagi pegawai dalam memahami standar dan regulasi untuk menyusun laporan keuangan yang baku. Indikator kedua adalah pengetahuan teknis SIPD, yaitu kompetensi krusial yang mencakup keahlian pegawai dalam memanfaatkan fitur-fitur sistem informasi secara optimal guna meningkatkan efisiensi pekerjaan. Indikator yang terakhir adalah keterampilan analisis data, yakni kemampuan teknis pegawai dalam menganalisis, menginterpretasi angka, dan mengidentifikasi tren keuangan secara akurat sehingga mampu menghasilkan kesimpulan yang tepat untuk mendukung pengambilan keputusan.

Kualitas Sistem SIPD

Kualitas sistem Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan representasi dari kinerja teknis sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup aspek keandalan, kemudahan penggunaan, kecepatan akses, serta keamanan data. Sistem dengan kualitas yang baik akan mampu mendukung proses kerja secara efektif, meminimalkan kesalahan pemrosesan, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Berdasarkan model keberhasilan sistem informasi, kualitas sistem menjadi salah satu determinan utama yang memengaruhi efektivitas penggunaan sekaligus kualitas informasi yang dihasilkan. Dalam konteks pemerintah daerah, kualitas sistem SIPD berperan krusial untuk memastikan ketepatan, konsistensi, dan integritas data yang menjadi landasan utama dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

Untuk mengukur kualitas sistem tersebut di BPKAD Kabupaten Dompu, penelitian ini mengadaptasi tiga dari enam indikator yang dikembangkan dalam kajian (Rahmawati, Pratiwi, & Wulandari, 2022) karena dinilai paling relevan. Indikator pertama adalah keandalan sistem (*system reliability*), yakni kemampuan SIPD untuk beroperasi secara konsisten, stabil, dan mampu menangani berbagai proses tanpa adanya gangguan atau *error* operasional yang signifikan. Indikator kedua adalah kemudahan penggunaan (*ease of use*), yang tercermin dari desain antarmuka (*user interface*) yang *user-friendly*, navigasi yang intuitif, serta fitur yang mudah diakses guna meminimalkan hambatan belajar bagi pengguna. Indikator terakhir adalah kecepatan akses (*response time*), yaitu ketanggapan sistem dalam memproses dan menampilkan data keuangan secara tepat waktu untuk meningkatkan produktivitas pengguna, mengurangi waktu tunggu, dan memastikan informasi selalu tersedia saat dibutuhkan.

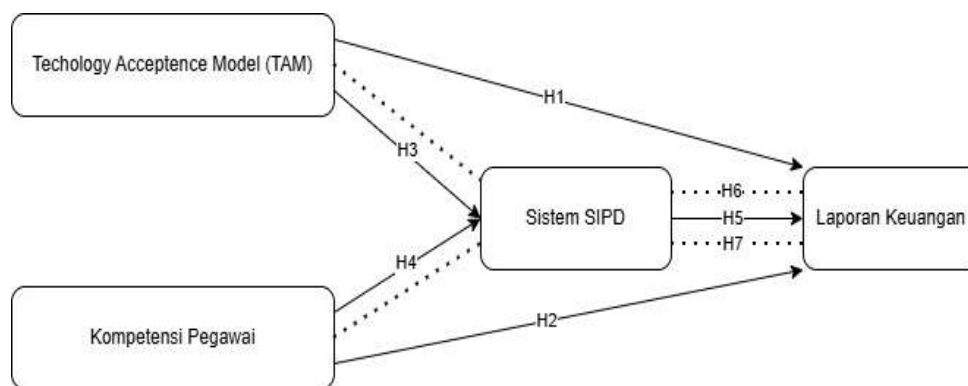
Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan kemampuan suatu laporan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Terpenuhinya karakteristik tersebut menunjukkan bahwa informasi keuangan telah disajikan secara jujur, lengkap, serta bebas dari kesalahan material, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mengukur variabel kualitas laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Dompu, penelitian ini mengadaptasi tiga dari enam indikator yang dikembangkan dalam kajian (Suryato & Noch, 2023) karena dinilai paling relevan. Indikator pertama adalah relevansi (*relevance*), yakni informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan harus sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mampu memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh para pemangku kepentingan. Indikator kedua adalah keandalan (*reliability*), yang mencerminkan bahwa informasi keuangan disajikan secara akurat, tidak mengandung bias, bebas dari kesalahan material, serta dapat diverifikasi melalui proses yang ketat sehingga datanya dapat dipercaya. Indikator terakhir adalah kelengkapan (*completeness*), yang berarti bahwa laporan keuangan telah mencakup seluruh elemen, transaksi, dan informasi penting sesuai standar akuntansi pemerintahan tanpa ada satupun bagian yang dihilangkan atau disembunyikan.

Kerangka Berpikir

Penelitian ini menguji hubungan kausal antara *Technology Acceptance Model* (TAM) dan kompetensi pegawai terhadap kualitas laporan keuangan dengan menempatkan kualitas sistem SIPD sebagai variabel mediasi. Secara konseptual, tingkat penerimaan teknologi dan kapabilitas pegawai akan menentukan seberapa optimal sistem SIPD dimanfaatkan. Pemanfaatan sistem yang optimal tersebut selanjutnya akan berdampak langsung pada peningkatan mutu informasi keuangan yang dihasilkan. Oleh karena itu, model penelitian ini menegaskan bahwa kualitas sistem SIPD berperan krusial sebagai mekanisme perantara (*mediation mechanism*) dalam menjelaskan bagaimana faktor manusia dan penerimaan teknologi berkontribusi terhadap pencapaian kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian kausal asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antarvariabel. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya melalui pengolahan data numerik secara statistik. Adapun hubungan kausal yang diuji dalam penelitian ini adalah pengaruh Technology Acceptance Model (TAM) dan kompetensi pegawai terhadap kualitas laporan keuangan melalui kualitas sistem SIPD sebagai variabel mediasi (Hadis, 2022).

Penelitian ini dilaksanakan pada BPKAD Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa BPKAD Kabupaten Dompu merupakan perangkat daerah yang berperan langsung dalam pengelolaan keuangan daerah, serta telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses pengelolaan keuangannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terlibat secara langsung dalam penggunaan SIPD dan penyusunan laporan keuangan daerah berjumlah 94 orang (Vitriana, Nugroho, & Lestari, 2022). Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, terdapat 76 pegawai yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah serta penggunaan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD).

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian dan diadaptasi dari instrumen penelitian terdahulu yang relevan. Kuesioner disebarkan secara langsung kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Pengukuran setiap pernyataan dalam kuesioner menggunakan skala Likert lima poin, yang terdiri atas sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju (Sekaran & Bougie, 2020).

Variabel penelitian dalam studi ini terdiri atas variabel independen, variabel mediasi, dan variabel dependen. Variabel independen meliputi Technology Acceptance Model (TAM) dan kompetensi pegawai, variabel mediasi adalah kualitas sistem SIPD, sedangkan variabel dependen adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data yang digunakan memenuhi syarat analisis regresi yang baik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal, yang dapat dilihat melalui uji Kolmogorov-Smirnov atau grafik P-P Plot. Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen, yang dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Sedangkan uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual, yang dapat diuji melalui grafik scatterplot atau uji Glejser. Apabila seluruh asumsi klasik terpenuhi, maka analisis regresi dapat dilanjutkan untuk pengujian hipotesis.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis regresi linier berganda, yang meliputi uji parsial dan simultan, serta analisis jalur untuk menguji peran mediasi variabel kualitas sistem SIPD (Nilamsari, Handayani, & Pratama, 2021). Pengujian pengaruh mediasi kualitas sistem SIPD dilakukan dengan pendekatan analisis jalur (path analysis) untuk mengidentifikasi pengaruh langsung dan tidak langsung antarvariabel. Variabel mediasi dinyatakan berperan apabila jalur pengaruh tidak langsung signifikan secara statistik. Seluruh proses pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengambil objek pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan instansi sentral dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan daerah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Adapun responden yang menjadi fokus pengamatan adalah para pegawai di instansi tersebut yang terlibat secara langsung dalam pengoperasian SIPD dan proses penyusunan pelaporan keuangan. Dari total populasi yang berjumlah 94 pegawai, penelitian ini menetapkan sampel sebanyak 76 responden yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Pemilihan responden secara spesifik ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar valid dan merepresentasikan kondisi faktual terkait penerimaan teknologi, tingkat kompetensi, serta kualitas pemanfaatan sistem oleh aparatur di BPKAD Kabupaten Dompu.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	R Hitung	Perbandingan	R Tabel	Keputusan
Technology Acceptance Model (TAM) (X1)	0,826	>	0,226	Valid
	0,813	>	0,226	Valid
	0,709	>	0,226	Valid
	0,579	>	0,226	Valid
	0,714	>	0,226	Valid
	0,612	>	0,226	Valid
	0,640	>	0,226	Valid
Kompetensi Pegawai (X2)	0,626	>	0,226	Valid
	0,607	>	0,226	Valid
	0,576	>	0,226	Valid
	0,569	>	0,226	Valid
	0,723	>	0,226	Valid
	0,702	>	0,226	Valid
	0,703	>	0,226	Valid
Kualitas Sistem SIPD (Z)	0,563	>	0,226	Valid
	0,774	>	0,226	Valid
	0,729	>	0,226	Valid
	0,624	>	0,226	Valid
	0,632	>	0,226	Valid
	0,595	>	0,226	Valid
	0,567	>	0,226	Valid
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,799	>	0,226	Valid
	0,756	>	0,226	Valid
	0,844	>	0,226	Valid
	0,713	>	0,226	Valid
	0,812	>	0,226	Valid
	0,784	>	0,226	Valid

Sumber: Hasil Data Primer Diolah (2026)

Tabel 1 menyajikan hasil uji validitas instrumen kuesioner untuk variabel *Technology Acceptance Model* (X1), Kompetensi Pegawai (X2), Kualitas Sistem SIPD (Z), dan Kualitas Laporan Keuangan (Y). Berdasarkan hasil pengolahan data primer (2026), seluruh item pernyataan pada keempat variabel tersebut menunjukkan nilai R hitung yang lebih besar dibandingkan dengan nilai R tabel (0,226), dengan nilai terendah sebesar 0,563 dan tertinggi mencapai 0,844. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan butir pernyataan dalam instrumen penelitian ini

dinyatakan valid, sehingga layak dan dapat digunakan sebagai alat ukur yang tepat untuk pengumpulan data ke tahap analisis selanjutnya.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Perbandingan	Standar Cronbach's Alpha	Keputusan
<i>Technology Acceptance Model</i> (TAM) (X1)	0,821	>	0,60	Reliabel
Kompetensi Pegawai (X2)	0,751	>	0,60	Reliabel
Kualitas Sistem SIPD (Z)	0,729	>	0,60	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,867	>	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 2, pengujian reliabilitas untuk seluruh instrumen variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari nilai standar Cronbach's Alpha yang ditetapkan sebesar 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian seluruh instrument memenuhi kriteria reliabilitas.

Tabel 3. Hasil Uji Deskriptif

Variabel	N	Min.	Max.	Mean	Std. Dev.
<i>Technology Acceptance Model</i> (TAM) (X1)	76	27	35	30.17	2.424
Kompetensi Pegawai (X2)	76	20	35	29.11	2.845
Kualitas Sistem SIPD (Z)	76	24	35	28.64	2.755
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	76	16	30	25.24	2.851
Valid N (listwise)	76				

Sumber: Hasil Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 3, hasil uji deskriptif terhadap 76 responden menunjukkan bahwa keseluruhan variabel penelitian memiliki distribusi data yang relatif homogen dengan tingkat penyebaran yang rendah, ditandai oleh nilai standar deviasi yang selalu lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-ratanya (mean). Secara spesifik, variabel *Technology Acceptance Model* (TAM) mencatatkan nilai minimum 27, maksimum 35, rata-rata 30,17, dan standar deviasi 2,424 yang mengindikasikan bahwa responden memberikan penilaian yang cukup tinggi. Selanjutnya, variabel kompetensi pegawai (minimum 20, maksimum 35) dan kualitas sistem SIPD (minimum 24, maksimum 35) juga dinilai cukup baik oleh responden, dengan nilai rata-rata masing-masing sebesar 29,11 dan 28,64, serta standar deviasi sebesar 2,845 dan 2,755. Terakhir, pada variabel kualitas laporan keuangan diperoleh nilai minimum 16, maksimum 30, rata-rata sebesar 25,24, dan standar deviasi 2,851, yang turut menegaskan bahwa kualitas pelaporan keuangan berada pada kategori cukup tinggi dengan sebaran data yang terpusat dengan baik.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Test Statistics	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
0,058	0,200	Data Berdistribusi Normal

Sumber: Hasil Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4, hasil uji Kolmogorov Smirnov diperoleh nilai Asym. Sig sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini data berdistribusi normal.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	t	Sig
<i>Technology Acceptance Model</i> (TAM)	-0,219	0,827
Kompetensi Pegawai	-0,026	0,979
Kualitas Sistem SIPD	0,327	0,744

Sumber: Hasil Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 5, hasil pengujian heteroskedastisitas, ditemukan bahwa nilai signifikansi untuk variabel *Technology Acceptance Model* (TAM) adalah 0,827, untuk variabel Kompetensi Pegawai adalah 0,979, dan untuk variabel Kualitas Sistem SIPD adalah 0,744. Karena semua nilai signifikansi ini lebih tinggi dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikasi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Sehingga model regresi memenuhi asumsi mengenai heteroskedastisitas dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF
<i>Technology Acceptance Model</i> (TAM) (X1)	0,9450	1,0582
Kompetensi Pegawai (X2)	0,5814	1,7200
Kualitas Sistem SIPD (Z)	0,5680	1,7605

Sumber: Hasil Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 6, analisis multikolinearitas, diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) di bawah 10. Variabel *Technology Acceptance Model* (TAM) (X1) menunjukkan nilai tolerance sebesar 0,9450 dan VIF sebesar 1,0582. Variabel Kompetensi Pegawai (X2) mencatat nilai tolerance sebesar 0,5814 dan VIF sebesar 1,7200. Sementara itu, variabel Kualitas Sistem SIPD (Z) memiliki nilai tolerance sebesar 0,5680 dan VIF sebesar 1,7605. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel independen dalam penelitian ini sehingga model regresi dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 7. Hasil Uji Parsial X1, X2 terhadap Z

Variabel	Coefisien	t
<i>Technology Acceptance Model</i> (TAM) (X1)	0,0368	0,3148
Kompetensi Pegawai (X2)	0,6176	6,9728

Sumber: Hasil Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan hasil uji parsial pada Tabel 7, variabel *Technology Acceptance Model* (TAM) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,0368 dengan tingkat signifikansi 0,7538. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun setiap peningkatan satu unit TAM secara teoretis diproyeksikan dapat meningkatkan kualitas sistem SIPD (Z) sebesar 0,0368 unit, pengaruh positif tersebut terbukti tidak signifikan karena nilai signifikansinya lebih besar dari ambang batas 0,05. Sebaliknya, variabel kompetensi pegawai mencatatkan nilai koefisien regresi sebesar 0,6176 dengan tingkat signifikansi 0,000. Angka ini bermakna bahwa setiap peningkatan satu satuan kompetensi pegawai akan secara konsisten meningkatkan kualitas sistem SIPD sebesar 0,6176 satuan, dengan asumsi variabel lainnya bernilai konstan. Mengingat nilai signifikansinya yang lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi pegawai secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas sistem SIPD.

Tabel 8. Hasil Uji Parsial X1,X2 terhadap Y melalui Z

Variabel	Coefisien	t
<i>Technology Acceptance Model</i> (TAM) (X1)	-0,2241	-1,5684
Kompetensi Pegawai (X2)	0,3724	2,6019
Kualitas Sistem SIPD (Z)	0,2991	2,1397

Sumber: Hasil Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 8 mengenai hasil uji parsial terhadap variabel Y, variabel *Technology Acceptance Model* (TAM) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,2241 dengan tingkat signifikansi 0,1212. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan TAM diproyeksikan akan menurunkan variabel Y sebesar 0,2241 satuan secara konstan, namun pengaruh negatif tersebut terbukti tidak signifikan karena nilai signifikansinya lebih besar dari ambang batas 0,05. Sebaliknya, variabel kompetensi pegawai mencatatkan nilai koefisien regresi sebesar 0,3724 dengan tingkat signifikansi 0,0112 (lebih kecil dari 0,05), yang berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan kompetensi pegawai akan memberikan pengaruh positif dan signifikan berupa peningkatan variabel Y sebesar 0,3724 satuan. Sejalan dengan hal tersebut, variabel kualitas sistem SIPD (Z) juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y, ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,2991 dan tingkat signifikansi 0,0358. Angka tersebut menegaskan bahwa setiap peningkatan satu satuan kualitas sistem SIPD akan secara konsisten meningkatkan variabel Y sebesar 0,2991 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

Tabel 9. Hasil Uji Simultan Model Z

Model	F	Sig
X1 dan X2 terhadap Z	26,2788	0,000

Sumber: Hasil Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 9, hasil analisis serentak, didapatkan nilai F sebesar 26,2788 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih rendah dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa *Technology Acceptance Model* (TAM) dan Kompetensi Pegawai secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Sistem SIPD.

Tabel 10. Hasil Uji Simultan Model Y

Model	F	Sig
X1, X2, dan Z terhadap Y	10,2527	0,000

Sumber: Hasil Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan hasil uji secara bersamaan, didapatkan nilai F mencapai 10,2527 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih rendah dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa *Technology Acceptance Model* (TAM), Kompetensi Pegawai, dan Kualitas Sistem SIPD memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y secara bersamaan.

Tabel 11. Hasil Uji Mediasi

Mediasi	Effect	BootLLCI	BootULCI	Kesimpulan
X1 → Z → Y	0,0137	-0,0804	0,1062	Tidak Memediasi
X2 → Z → Y	0,23	0,0613	0,4194	Memediasi

Sumber: Hasil Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 11 mengenai hasil uji mediasi, analisis efek tidak langsung (*indirect effect*) menunjukkan temuan yang berbeda untuk kedua jalur yang diuji. Pada jalur pertama, diperoleh nilai efek tidak langsung sebesar 0,0137 dengan rentang *BootLLCI* pada angka -0,0804 dan *BootULCI* sebesar 0,1062. Karena rentang interval kepercayaan tersebut mencakup angka nol (berada di antara nilai negatif dan positif), dapat disimpulkan bahwa kualitas sistem SIPD (Z) tidak berfungsi sebagai mediator dalam pengaruh *Technology Acceptance Model* (TAM) terhadap variabel Y. Sebaliknya, pada pengujian jalur kedua, temuan analisis menunjukkan nilai efek tidak langsung sebesar 0,2300 dengan rentang *BootLLCI* (0,0613) dan *BootULCI* (0,4194) yang seluruhnya bernilai positif dan tidak mencakup angka nol. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas sistem SIPD terbukti secara signifikan memediasi hubungan antara kompetensi pegawai (X2) dan variabel Y. Mengingat kompetensi pegawai juga terbukti memiliki pengaruh langsung pada pengujian sebelumnya, maka jenis mediasi yang terjadi diklasifikasikan sebagai mediasi parsial (*partial mediation*), yang bermakna

bahwa kompetensi pegawai dapat memengaruhi variabel Y baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui peran kualitas sistem SIPD.

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R Square
X1 dan X2 terhadap Z	0,4186
X1 dan X2 terhadap Y	0,2334
X1, X2, dan Z terhadap Y	0,2993

Sumber: Hasil Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 12 mengenai hasil uji koefisien determinasi (*R Square*), kemampuan model dalam menjelaskan fenomena yang diteliti dapat dievaluasi melalui tiga tahap pengujian. Pada pengujian model pertama, diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,4186 yang mengindikasikan bahwa variabel *Technology Acceptance Model* (TAM) dan kompetensi pegawai secara bersama-sama mampu menjelaskan varians kualitas sistem SIPD (Z) sebesar 41,86%, sementara 58,14% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar fokus penelitian. Selanjutnya, pada pengujian model kedua, kontribusi gabungan dari TAM dan kompetensi pegawai dalam menerangkan variabel kualitas laporan keuangan (Y) menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0,2334, yang berarti daya penjelasnya mencapai 23,34% dengan sisa 76,66% dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya. Terakhir, ketika kualitas sistem SIPD dilibatkan secara simultan bersama TAM dan kompetensi pegawai pada pengujian model ketiga, kemampuan prediksi model dalam menjelaskan kualitas laporan keuangan mengalami peningkatan dengan capaian nilai *R Square* sebesar 0,2993. Angka ini menegaskan bahwa ketiga variabel tersebut secara keseluruhan memberikan kontribusi penjelasan sebesar 29,93% terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan mayoritas sisanya yakni 70,07% sangat ditentukan oleh berbagai variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam cakupan penelitian ini.

H1: Pengaruh *Technology Acceptance Model* (TAM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, H1 dinyatakan tidak berpengaruh signifikan atau ditolak, karena penerimaan teknologi oleh pegawai belum menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh pemanfaatan teknologi yang belum optimal atau adanya faktor lain yang lebih berperan dalam mendukung kualitas laporan keuangan, seperti kompetensi pegawai dan kualitas sistem yang digunakan.

Temuan ini sejalan dengan konsep *Technology Acceptance Model* (TAM) Davis (1989) yang menyatakan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*. TAM pada dasarnya menekankan bagaimana individu menerima dan menggunakan teknologi, bukan sejauh mana penerimaan tersebut langsung menghasilkan kualitas output organisasi. Dengan demikian, meskipun pegawai memiliki persepsi positif terhadap sistem, hal tersebut belum cukup untuk secara langsung meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Widanengsih (2021) yang menemukan bahwa persepsi manfaat tidak berpengaruh signifikan terhadap sikap penggunaan, dan sikap penggunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat perilaku penggunaan sistem. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan teknologi, meskipun terbentuk secara persepsi, belum tentu berdampak langsung terhadap kualitas output yang dihasilkan pada instansi pemerintah daerah.

H2: Pengaruh Kompetensi Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, H2 dinyatakan berpengaruh signifikan atau diterima, karena kompetensi pegawai terbukti memberikan pengaruh positif dan nyata terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas, maka kualitas laporan keuangan yang disusun juga cenderung semakin baik. Penelitian ini didukung oleh teori kompetensi yang dikemukakan oleh Leny & Suyasa (2006) yang menjelaskan bahwa kompetensi merupakan karakteristik individu yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya secara efektif. Kompetensi mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), kemampuan (*ability*), serta perilaku kerja yang mendukung

keberhasilan dalam menjalankan pekerjaan. Semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki seseorang, maka semakin besar kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan secara tepat dan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis mengenai pengaruh kompetensi pegawai terhadap kualitas laporan keuangan dapat diterima.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Hidayatulloh & Fadilah (2023) pada OPD Daerah Istimewa Yogyakarta yang menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dibuktikan melalui analisis regresi linear berganda terhadap 83 pegawai dari 23 OPD DIY. Hasil ini juga diperkuat oleh penelitian Nuryanto, Enggok, & Abdurrahman (2022) pada BPKAD Kabupaten Bondowoso yang menyimpulkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, mempertegas bahwa kompetensi pegawai merupakan faktor penentu yang konsisten pada instansi pemerintah daerah.

H3: Pengaruh *Technology Acceptance Model* (TAM) terhadap Kualitas Sistem SIPD

Berdasarkan hasil penelitian H3 dinyatakan tidak berpengaruh signifikan atau ditolak, karena penerimaan teknologi oleh pegawai belum memberikan pengaruh yang nyata terhadap kualitas sistem SIPD yang digunakan. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi pegawai terkait kemudahan maupun manfaat penggunaan sistem belum cukup mendorong peningkatan kualitas SIPD, sehingga kemungkinan terdapat faktor lain yang lebih berperan dalam memengaruhi kualitas sistem tersebut. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa TAM berpengaruh terhadap kualitas sistem SIPD tidak dapat diterima. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat penerimaan teknologi oleh pegawai belum memberikan pengaruh nyata terhadap kualitas sistem SIPD yang digunakan.

Temuan ini sejalan dengan konsep *Technology Acceptance Model* (TAM) Davis (1989) yang menyatakan bahwa penerimaan teknologi merupakan proses tiga tahap, di mana faktor eksternal memicu respons kognitif berupa persepsi kemudahan dan kemanfaatan, yang kemudian membentuk sikap penggunaan dan perilaku penggunaan nyata. TAM lebih berfokus pada perilaku penerimaan pengguna, bukan langsung pada kualitas teknis sistem. Hal ini diperkuat oleh pengembangan TAM2 Venkatesh & Davis (2000) yang menegaskan bahwa kualitas sistem lebih ditentukan oleh aspek teknis dan operasional, bukan semata oleh tingkat penerimaan pengguna.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Widiastuti (2023) yang menemukan bahwa aplikasi SIPD tidak efektif meningkatkan kualitas laporan keuangan di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, serta penelitian Nitasya (2024) yang menunjukkan penerapan SIPD belum efektif dari segi ekspektasi kinerja dan ekspektasi usaha di OPD Kota Mataram. Peningkatan kualitas SIPD perlu didukung penguatan infrastruktur teknis dan pelatihan yang memadai, bukan hanya bertumpu pada penerimaan teknologi pegawai.

H4: Pengaruh Kompetensi Pegawai terhadap Kualitas Sistem SIPD

Hasil pengujian menunjukkan bahwa H4 dinyatakan berpengaruh signifikan atau diterima, karena kompetensi pegawai terbukti memberikan pengaruh positif dan nyata terhadap kualitas sistem SIPD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi yang dimiliki pegawai, maka kualitas sistem SIPD juga cenderung semakin baik. Kompetensi pegawai yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam menjalankan tugas membantu proses penggunaan SIPD menjadi lebih optimal.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori kompetensi Suyasa & Tomi (2010) yang menjelaskan bahwa kompetensi merupakan kemampuan individu dalam melaksanakan tugas secara efektif yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan kemampuan (*ability*). Pegawai yang memiliki kompetensi yang baik cenderung lebih mampu memahami mekanisme kerja, mengoperasikan sistem informasi, serta menyelesaikan tugas sesuai prosedur yang berlaku. Dalam penggunaan SIPD, kompetensi pegawai menjadi faktor penting karena pegawai yang memiliki pemahaman dan kemampuan teknis yang memadai akan lebih mudah memanfaatkan fitur-fitur sistem, meminimalkan kesalahan penginputan data, serta meningkatkan efektivitas penggunaan sistem dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Norman et al., (2025) mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja instansi pemerintah di BPKAD Kabupaten Deiyai yang

menunjukkan bahwa kompetensi SDM yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan efektivitas dan kualitas kinerja instansi pemerintah. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pegawai yang kompeten mampu beradaptasi dengan sistem kerja, memahami prosedur operasional, serta memanfaatkan teknologi secara lebih efektif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, hasil penelitian pada BPKAD Kabupaten Dompu memperkuat bahwa kualitas sistem SIPD tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknologi, tetapi juga sangat ditentukan oleh kompetensi pegawai sebagai pengguna sistem. Semakin baik kompetensi pegawai, maka semakin optimal pula kualitas penggunaan SIPD dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi.

H5: Pengaruh Kualitas Sistem SIPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa H5 dinyatakan berpengaruh signifikan atau diterima, karena kualitas sistem SIPD terbukti memberikan pengaruh positif dan nyata terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga hipotesis yang diajukan dinyatakan diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas sistem SIPD yang digunakan, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, karena SIPD membantu proses pengelolaan data keuangan menjadi lebih terstruktur mulai dari pencatatan, pengolahan, hingga penyusunan laporan keuangan.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone & McLean (1992) yang mengukur keberhasilan sistem informasi melalui kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, dan kepuasan pengguna yang dihubungkan dengan manfaat bersih bagi individu dan organisasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, manfaat bersih tersebut diwujudkan dalam bentuk kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, SIPD sebagai sistem informasi keuangan yang terintegrasi berperan strategis dalam mendukung pelaporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Timang (2025) yang menyatakan bahwa implementasi SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena sistem informasi yang terintegrasi mampu meningkatkan keteraturan pengelolaan keuangan dan kualitas laporan yang dihasilkan.

H6: Pengaruh *Technology Acceptance Model* (TAM) dan Kompetensi Pegawai terhadap Kualitas Sistem SIPD secara Simultan

Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa H6 dinyatakan berpengaruh signifikan atau diterima, karena kedua variabel tersebut secara bersama-sama terbukti memberikan pengaruh yang nyata terhadap kualitas sistem SIPD. Temuan ini memperlihatkan bahwa kualitas SIPD tidak dapat dilepaskan dari dua hal penting, yaitu bagaimana pegawai menerima teknologi yang digunakan serta seberapa baik kemampuan mereka dalam mengoperasikan sistem tersebut dalam pekerjaan sehari-hari.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui dua landasan teori yang saling melengkapi, yaitu *Technology Acceptance Model* (TAM) Davis (1989) yang menegaskan bahwa persepsi kemudahan dan kemanfaatan membentuk perilaku penggunaan nyata, serta teori kompetensi Leny & Suyasa (2006) yang menyatakan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan kerja merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas. Penerimaan teknologi tanpa kompetensi yang memadai tidak akan mengoptimalkan kualitas penggunaan sistem, begitu pula sebaliknya.

Hal ini sejalan dengan penelitian Riani, Agung, Putri, Agus, & Pratama (2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi SIPD sangat ditentukan oleh kesiapan pengguna menerima teknologi dan kemampuan mengoperasikan sistem secara efektif. Dengan demikian, ketika penerimaan teknologi dan kompetensi pegawai berjalan seimbang, kualitas sistem SIPD akan semakin mendukung pengelolaan keuangan daerah secara lebih efektif.

H7: Pengaruh *Technology Acceptance Model* (TAM), Kompetensi Pegawai, dan Kualitas Sistem SIPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara Simultan

Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa H7 dinyatakan berpengaruh signifikan atau diterima. Kualitas laporan keuangan ditentukan oleh keterkaitan tiga faktor sekaligus: bagaimana pegawai

menerima dan merasakan manfaat teknologi, kemampuan mereka dalam mengoperasikan sistem, serta kualitas sistem SIPD itu sendiri dalam mendukung pengelolaan data keuangan daerah.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui tiga landasan teori yang saling melengkapi. Pertama, *Technology Acceptance Model* (TAM) Davis (1989) menegaskan bahwa persepsi kemudahan dan kemanfaatan teknologi membentuk perilaku penggunaan sistem secara nyata. Kedua, teori kompetensi Leny & Suyasa (2006) menyatakan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan kerja menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas. Ketiga, Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone & McLean (1992) menegaskan bahwa kualitas sistem yang baik menghasilkan manfaat bersih bagi organisasi, yang dalam konteks pemerintahan diwujudkan melalui laporan keuangan yang akurat dan akuntabel. Ketiga teori ini membentuk satu kesatuan yang saling berinteraksi dalam menentukan kualitas output organisasi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Hului, 2023) pada Pemerintah Kota Jambi yang menemukan bahwa kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian pada BPKAD Kabupaten Badung juga menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan kompetensi SDM berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, peningkatan kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Dompu sangat bergantung pada sinergi antara penerimaan teknologi, kompetensi pegawai, dan kualitas sistem SIPD yang digunakan secara bersamaan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh *Technology Acceptance Model* (TAM) dan Kompetensi Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Kualitas Sistem SIPD pada BPKAD Kabupaten Dompu, dapat disimpulkan bahwa kompetensi pegawai dan kualitas sistem SIPD merupakan faktor yang memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Sementara itu, *Technology Acceptance Model* (TAM) belum menunjukkan pengaruh yang signifikan, baik terhadap kualitas sistem SIPD maupun kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kompetensi pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas sistem SIPD serta kualitas laporan keuangan, yang menunjukkan pentingnya kemampuan sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah berbasis sistem informasi. Selain itu, kualitas sistem SIPD juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga semakin baik sistem yang diterapkan maka semakin baik pula kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa kualitas sistem SIPD mampu memediasi hubungan antara kompetensi pegawai dan kualitas laporan keuangan, namun tidak mampu memediasi hubungan antara TAM dan kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, peningkatan kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Dompu perlu difokuskan pada penguatan kompetensi pegawai, optimalisasi kualitas sistem SIPD, serta peningkatan dukungan teknis dan pelatihan yang berkelanjutan agar implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dapat berjalan secara maksimal dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat, transparan, serta akuntabel.

REFERENSI

- Aprila, Dandi, Andriani, Wiwik, & Ananto, Rangga Putra. (2023). Financial Management of Nagari Owned Enterprises (Bumnag) and Its Impact on Community Welfare. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(2), 210. <https://doi.org/10.30813/jab.v16i2.4461>
- Azhar, K., & Sari, R. N. (2022). Pengaruh technology acceptance model terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(2), 145–159. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i2.17854>
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (1992). Information systems success: The quest for the dependent variable. *Information Systems Research*, 3(1), 60–95.
- Hadis, Febrianita. (2022). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 12(1), 67–79.
- Herlina, Ria, Taufik, Taufeni, & Nasir, Azwir. (2021). Transparency, Competency, Financial Accounting System, The Accountability of Regional Financial Management, Implementation of The Government Internal

- Control System. *Journal Of Economic, Business and Accounting*, 4(2), 419–433.
- Hidayatulloh, A., & Fadilah, S. (2023). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*.
- Hului. (2023). Kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Jambi: Komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 11(2), 197–206.
- Leny, & Suyasa, P. T. Y. S. (2006a). Minat membaca, kompetensi, dan kinerja. *Phronesis: Jurnal Ilmiah Psikologi Industri Dan Organisasi*, 8(2), 218–233.
- Leny, & Suyasa, P. Tommy Y. S. (2006b). *Keaktifan Berorganisasi dan Kompetensi Interpersonal Work Engagement View project*. 71–99. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/260750466>
- Nilamsari, N., Handayani, R., & Pratama, A. (2021). Analisis jalur dalam pengujian variabel mediasi pada penelitian akuntansi sektor publik. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 123–134.
- Nitasya, D. (2024). Implementasi sistem informasi pemerintah daerah: Apakah efektif dalam penyusunan laporan keuangan OPD Kota Mataram? *Jurnal Locus Majalah Ilmiah Fisip*, 11(2), 117.
- Noman, Misraim Imanuel, Pasae, Yoel, & Sabandar, Sita Yubelina. (2025). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di BPKAD Kabupaten Deiyai*. 1(2), 407–413.
- Nuryanto, N., Enggok, M. S., & Abdurrahman, A. (2022). Kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*.
- Rahmawati, D., Pratiwi, R. D., & Wulandari, S. (2022). Kualitas sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) sebagai mediasi pengaruh dukungan manajemen puncak dan kompetensi pengguna terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 22(1), 78–92.
- Riani, Agung, Putri, Agus, & Pratama. (2021). *Pengaruh persepsi kemudahan, manfaat sistem, dan kesiapan SDM terhadap optimalisasi penggunaan SIPD di lingkungan pemerintah daerah*.
- Sa'adah, Shohabatus, & Nasrullah, Muhammad. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. *Journal of Public Accounting (JPA)*, 1(1), 14–24. <https://doi.org/10.30591/jpa.v1i1.2614>
- Sayekti, F., & Putarta, P. (2016). Penerapan Technology Acceptance Model (TAM) dalam pengujian model penerimaan Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan*, 9(3), 196–209. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v9i3.3075>
- Sekaran, Uma, & Bougie, Roger. (2020). *Research methods for business: A skill building approach* (8th ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.
- Suryato, Dede, & Noch, R. Muchammad. (2023). Pengaruh Kompetensi Pegawai, Penerapan IT dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Brainy: Jurnal Riset Mahasiswa*, 3(2), 18–27.
- Suyasa, P. & Tommy Y. S.. (2010). *Pemetaan Kompetensi Berbasis Nilai*. 13(1).
- Timang. (2025). *Pengaruh implementasi SIPD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*.
- Vitriana, E., Nugroho, A., & Lestari, D. (2022). Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dan implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 7(2), 45–58.
- Widanengsih, S. (2021). Analisis technology acceptance model (TAM) terhadap penggunaan Livin by Mandiri. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*.
- Widiastuti. (2023). *Efektivitas aplikasi SIPD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa*.